



## Segera Bentuk Tim Penyelesaian

**SINGKAWANG**-Persoalan aset yang tak kunjung usai dari tahun ke tahun dikawatirkan menjadi sandungan bagi pemerintah kota untuk memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sebagian besar fraksi yang ada di DPRD Kota Singkawang menyampaikan keprihatinannya dalam pendapat akhir mereka kemarin.

Empat dari lima fraksi yang ada di DPRD Kota Singkawang menyoroti masalah aset tersebut saat menyampaikan Pendapat Akhir (PA) atas Raperda tentang pelaksanaan APBD Kota Singkawang TA 2012 dan Raperda tentang pajak, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Rabu (25/9) di Ruang Utama.

Empat fraksi yang mengkritik belum selesainya masalah aset, adalah Fraksi Demokrat, Golkar, Fraksi Aksena, Fraksi Gerhana. Ke empat fraksi tersebut meminta Pemkot untuk segera selesaikan masalah aset, lantaran jika itu belum selesai, kota ini tidak akan pernah mendapatkan opini WTP.

Seperti disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Jhonni Sun. Fraksi ini melihat, mengenai aset Kota Singkawang yang belum selesai semenjak kota ini terbentuk, harus menjadi perhatian Pemkot. Wali Kota diharapkan menertibkan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak, khususnya aset bergerak yang masih dikuasai orang yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah Singkawang.

"Apa bila masalah aset tersebut tidak dapat diselesaikan akan terus menjadi temuan dalam LHP BPK-RI, laporan keuangan Kota Singkawang pun tidak akan pernah mendapatkan WTP," kata Jhonni, Rabu (25/9).

Fraksi Golkar melalui Juru Bicaranya, Zainal Abidin menyebutkan agar permasalahan aset segera diselesaikan dengan membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Aset, sehingga ke depannya tidak selalu menjadi temuan dalam LHP BPK RI. Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan juru bicara Fraksi Indonesia Baru, Lie Kian Loy.

Fraksi Aksena, melalui juru bicaranya Martuin mengatakan banyak aset yang belum diserahkan dari Kabupaten induk (Kabupaten Sambas-Kabupaten Bengkayang) kepada Pemkot Singkawang. Pihaknya berharap Pemkot proaktif untuk mendapatkan penyerahan aset tersebut. Fraksi Gerhana, melalui juru bicaranya Victorianus juga menyoroti masalah aset, dimana selama Kota Singkawang berdiri sampai sekarang belum selesai. Pihaknya menganggap ini dikarenakan tidak didukung dokumen yang memadai dan kebijakan belum optimal. (fah)